

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
KECAMATAN SRUWENG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG**

Sekretariat : Jl. Raya Sruweng No. 1 Kode Pos 34382

SRUWENG – KEBUMEN

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
KECAMATAN SRUWENG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG**

Sekretariat : Jl. Raya Sruweng No. 3 Kode Pos 54362

SRUWENG – KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,

td

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETAKIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

td

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan pada suatu wilayah, memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Hendaknya perencanaan pembangunan bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) serta *aplikatif* (dapat diterapkan).

Hubungan antara wilayah sebagai obyek pembangunan dengan konsep perencanaan pembangunan apabila terciptanya sebuah proses perencanaan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memperhatikan aspek memanfaatkan, mendayagunakan berbagai sumber yang ada, menyeluruh, lengkap dan berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sruweng Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahun terakhir yang merupakan penjabaran dari perencanaan 5 (lima) tahunan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2016-2021. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Sruweng Tahun 2021 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2021).

Jul 2020
KECAMATAN SRUWENG
KEBUNING
SRIWITNO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19641024 198607 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mengenai sebagian urusan otonomi Daerah, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa;
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kerja menengah;
9. Pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi Pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;

14. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
16. Melaksanakan pengendalian pembangunan Daerah;

B. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan kelurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang rincian tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja di susun dengan maksud untuk menyusun rencana program /kegiatan yang menjadi prioritas pada Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, payung hukum dan kemampuan anggaran.

2. Tujuan

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Tahun ²⁰²² 2021 bertujuan untuk :

- a. Menyelaraskan program dan kegiatan sesuai rencana strategis (Restra) Kecamatan Kabupaten Kebumen.
- b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif yang termuat dalam prioritas

- pembangunan Daerah pada rancangan awal rencana kerja perangkat Daerah, dan
- d. Mengidentifikasi kebutuhan kerangka regulasi yang berkaitan untuk mendukung terlaksananya rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja satuan kerja perangkat kerja pangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah Tahun lalu
- B. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah
- C. Review terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kebumen
- D. Penelaahan usulan program dan kegiatan atau Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

LAMPIRAN

- Daftar hadir Musrenbang 2019. 2020
- Berita acara Musrenbangcam 2019. 2020
- Notulen.
- Print out simper 2021
- Print Out RAB 2021

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tercemrin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan. Capaian indikator kinerjanya adalah terlaksananya motivasi kerja SDM yang ada sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat terselenggara dengan baik dengan target capaian kinerja fisik mencapai 100% dan keuangan 99,03%
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Capaian indikator kinerjanya adalah tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk pelayanan masyarakat, yaitu ditandai dengan target capaian kinerja fisik mencapai 100% dan keuangan 100%
3. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan ketersediaan data yang valid dan aktual untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Daerah dan pusat. Capaian indikator kinerjanya adalah terfungsinya penyelenggaraan Musrenbangdes di 21 (dua puluh satu) desa dan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dengan menghasilkan kesepakatan dalam usulan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tingkat Kecamatan. Target fisik kegiatan ini tercapai 100% dan target keuangan 100%.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur desa dengan capaian indikator kinerja yaitu terselenggaranya rapat koordinasi Inventarisasi Proyek Masuk Desa Tahun 2019 ddengan 21 (dua puluh satu) desa dan tersusunya Dokumen Inventaris Proyrk Masuk Desa sejumlah 5 (lima) buku. Target fisik kegiatan ini tercapai 100% dan taget keuangan 100%
5. Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik Daerah dalam rangka mendukung pembangunan dengan capaian indikator kinerja yaitu tersusunya dokumen data base dan profil desa / Kecamatan yang berisi buku rangkuman 8 (delapan) kelompok data Tahun 2019 dari 21 (dua puluh satu) desa. Target capaian kinerja fisik kegiatan ini tercapai 100% dan target keuangan 99,99%
6. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Sriuweng dengan capaian indikator

... ..

1.
2.
3.

Tabel 2.1 EVALUASI RENJA KECAMATAN SRUWENG TAHUN LALU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program (Rencana SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD) Tahun 2020	Program Realisasi Capaian Target Kinerja SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Rencana SKPD Tahun 2019	Realisasi Rencana SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat partisipasi petugas LHMIS dalam penyprn-dahan keamanan	525	51	100					
	Pembinaan PKL Transibum	Terlaksananya terasge keamanan dan kenyamanan lingkungan	525	51	7,23	21				
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengrusakan keamanan lingkungan	72	51			12			
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah									

Facilitasi APBDes	Terselenggaranya fasilitas APBDes	72	51	26,4	21	50 %	12	33,33 %	466,62 %
Facilitasi program pembangunan	Terselenggaranya fasilitas program pembangunan	72	51	15	21	42,06 %	12		
Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah desa	Prosentase aparatur desa yang meningkat kemasannya	72	51	20					
Pembinaan dan Pelatihan Perungkat Desa	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan perungkat desa	72	51	7					
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	72	51	100					
Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan PKK; TC	72	51	92		49,21 %	12	32,34 %	16,11 %
Keperumudaan dan Olah Raga									
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pembangunan desa	72	51	100					
Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	72	51	6	21	80 %	12		

Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya pembinaan sosial masyarakat	72	51	10	21	46,03 %	13	
Statistik								
Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah	Tersedianya dokumen database perangkat Daerah	72	51	27				
Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya database dan profil desa/Kecamatan	72	51	9	2	50 %	12	
Pungsi Pemunjang Urusan Pemerintahan			0					
Perencanaan Pembangunan								
Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat Daerah	72	51	155			12	
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dan terkumpulnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	72	51	5		35 %	12	14,73 %
Program perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	72	51	25				

Penyelenggaraan Muatanbangcom	Terelenggarannya Muatanbangcom	72	51	25	2	50 %	12	
Purugi Lainnya								
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosesase peroguan layanan KTP dan perijinan yang tertanggung	72	33	100				
Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEM)	Terfaalilasinya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEM)	72	33	64,57		50 %	12	43,82 %
Program Pendukung Operasional SKPD								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	72	51	15				
Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	72	57	2	1,99	50 %	12	25,79 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terelenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	51	18	13,78	48,61 %	12	31,94 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Terelenggaranya jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	72	51	30	36,92	50 %	12	38,58 %
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terelenggaranya jasa administrasi keuangan	72	51	18	16	50 %	12	31,97 %

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan secara cukup optimal yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Belum berjalannya pelayanan public yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan public serta prodigma mainstream masyarakat yaitu : bahwa urusan pelayanan di Pemerintah sangat birokratif dan berbelit. Sampai Tahun 2019 penyelenggaraan pelayanan public berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih berjalan optimal sehingga masih perlu mendapatkan profosal afirmasi yang lebih; dan
2. Belum optimalnya fungsi desa sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang; dan
3. Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban Pemerintah Kecamatan; dan
4. Data penduduk di RT / RW kurang lengkap; dan
5. Pemahaman terhadap Administrasi Kependudukan masih kurang; dan
6. Swadaya masyarakat sangat terbatas; dan
7. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan Pemerintah masih rendah.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan .

TABEL 2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SRUWENG

Nomor	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SPM/ STANDAR NASIONAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		KATEGORI PENCAPAIAN
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengetahuan dalam keamanan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	27.000.000	27.000.000								
	Terfasilitasi-sinya kegiatan2 HUT RI	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000	25.000.000								
		Sosial										
	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	8.000.000	8.000.000						2.771.000		
	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembaga-an desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31.000.000	10.000.000						2.500.000		

C. Review Usulan Program Dan Kegiatan Kecamatan

Review terhadap rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target rencana Strategis satuan kerja perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh satuan kerja perangkat terkait dengan prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang ada.

Adapun review terhadap rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai mana tabel 31

TABEL 2.3 REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SRUWENG

Nomor	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.20.18	KECAMATAN SRUWENG					KECAMATAN SRUWENG				1.744.700.000			
7.1.20.18	UNSUB KEMILAYAHAN					UNSUB KEMILAYAHAN				281.000.000			
7.01.1.20.18	KECAMATAN					KECAMATAN				281.000.000			
7.01.1.20.18.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75.000.000			
7.01.1.20.18.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Disampaikan kepada Camat					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Disampaikan kepada Camat				15.000.000			
7.01.1.20.18.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perencanaan	KECAMATAN SRUWENG	Jumlah pelayanan perijinan yang dilakukakan	1 Jenis	3.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perencanaan	KECAMATAN TAN BRUWE NG	Jumlah pelayanan perijinan yang dilakukakan	1 Jenis	0			
7.01.1.20.18.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperencanaan	KECAMATAN SRUWENG	Jumlah pelayanan perijinan yang dilakukakan	6 Jenis	49.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperencanaan	KECAMATAN TAN BRUWE NG	Jumlah pelayanan perijinan yang dilakukakan	6 Jenis	75.000.000			

7.01.1.20.18.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.000.000	166.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			176.000.000
7.01.1.20.18.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 Desa	23.100.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 Desa	45.000.000		
		--- Jumlah dokumen profil data base yang disusun	--- 1 Desa	-		--- Jumlah dokumen profil data base yang disusun	--- 1 Desa			
		Jumlah desa yang teridentifikasi penyusunan APBDesa	21 Desa	-		Jumlah desa yang teridentifikasi penyusunan APBDesa	21 Desa			
7.01.1.20.18.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dibutuhkan	6 Desa	7.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dibutuhkan	6 Desa	10.000.000		

7.01.1.20.18.06.2.01.09	7.000.000	1	Desa	1	Desa	15.000.000	Jumlah disburse-akan perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	1	Desa	Jumlah disburse-akan perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	1	Desa	15.000.000
	-	4	Kali	4	Kali		Jumlah raker sipperencanaan pembangunan Daerah	4	Kali	Jumlah raker sipperencanaan pembangunan Daerah	4	Kali	
7.01.1.20.18.06.2.01.11	16.100.000	2	Kegiatan	2	Kegiatan		Jumlah kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan dan Keterampilan dan Keterampilan Umum	2	Kegiatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan dan Keterampilan dan Keterampilan Umum	2	Kegiatan	20.000.000
7.01.1.20.18.06.2.01.12	24.500.000	21	Desa	21	Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan pembangunan	21	Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan pembangunan	21	Desa	20.000.000
	-	3	Kegiatan	3	Kegiatan		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan pembangunan	3	Kegiatan	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan pembangunan	3	Kegiatan	

7.01.1.20.18.05.2.01.10	7.01.1.20.18.05.2.01.17	X.1.20.18	X.XX.1.20.18	X.XX.1.20.18.01	X.XX.1.20.18.01.2.01.01	X.XX.1.20.18.01.2.01.03	X.XX.1.20.18.01.2.02
Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembelajaran Pembelajaran Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembelajaran Pembelajaran Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK 1 Kegiatan
40.000.000	4.000.000	31.500.000	1.503.738.000	1.503.738.000	1.503.738.000	1.503.738.000	1.503.738.000
4	2	4	4	4	4	4	4
17.962.000	7.562.000	10.000.000	1.314.061.000	1.314.061.000	1.314.061.000	1.314.061.000	1.314.061.000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.400.000	4.100.000	8.400.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan

X.XX.1.20.18 .01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15 Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15 Orang	1.104.861.000,00
X.XX.1.20.18 .01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	15 Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	15 Orang	20.000.000,00
X.XX.1.20.18 .01 .2.03.01	Administrasi Umum	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket	Administrasi Umum	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket	4.800.000,00
X.XX.1.20.18 .01 .2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Paket	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Paket	30.000.000,00
X.XX.1.20.18 .01 .2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	7 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	7 Unit	37.000.000,00

Kode	Perencanaan Bahan Baku dan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan dan Perundang-Undangan	12 Jenis	2.100.000	Perencanaan Bahan Baku dan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan dan Perundang-Undangan	12 Jenis	3.300.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.15	Perencanaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Paket	11.235.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Paket	18.050.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Paket-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48 Orasi /Kab	4.900.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Paket-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48 Orasi /Kab	10.000.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit	27.000.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	21.700.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	25.000.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.27	Pengadaan Mebelur	Jumlah unit pengadaan Mebelur	19 Unit	4.900.000	Pengadaan Mebelur	Jumlah unit pengadaan Mebelur	19 Unit	7.402.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.25	Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	1 Unit	2.500.000	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	1 Unit	4.441.000
X.XX.1.20.18.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Perbaikan Gedung Kantor	3 Unit	4.059.400	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perbaikan Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Perbaikan Gedung Kantor	3 Unit	7.000.000

D. Pemelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

TABEL 2.3 TARGET KINERJA KECAMATAN TAHUN 2021 SESUAI TARGET RENSTRA 2016-2021

No.	Program /Kegiatan /sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Besaran/ Volume	Catatan
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	1.03.10.2.01- Penyelenggaraan Jalan kabupaten				
	1.03.10.2.01.11- Pemeliharaan Rutin jalan	Kecamatan Sruweng	Desa Condongrempur	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan	1 paket (292.500.000)

2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian					
	3.27.03.2.02.01-Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kecamatan Sruweng				
		Desa Sidoharjo	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	1 Paket (105.000.000)		
		Desa Tanggeran	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	1 Paket (150.000.000)		
		Desa Trikarso	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	1 Paket (58.089.000)		

	3.27.03.2.02.09-Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				
	Desa Purwodeso	Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi desa(JIDES)	1 paket / 105.000.000)		
	Desa Klepusanggar	Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi desa(JIDES)	1 paket / 86.000.000)		
	JUMLAH TOTAL				796.389.000

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk di dalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen. Kemudian agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif dalam rangka terlaksananya *good governance* atau Pemerintah yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan, baik dari unsur Pemerintah pusat, provinsi, maupun Daerah.

Berdasarkan telaahan di atas, maka program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKDP-Kecamatan yang merupakan pelimpahan wewenang dari bupati Kebumen, antara lain:

1. Program Pengembangan data/informasi;
2. Program perencanaan pembangunan Daerah;
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
4. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
5. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
10. Program pengembangan data/informasi /statistik Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Kecamatan Kebumen Tahun 2020 adalah memberi gambaran program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah. Dan sasarannya adalah terselenggaranya seluruh kegiatan yang sudah ditentukan dalam rangka mendukung tujuan tersebut.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 merupakan penjabaran dari visi Kecamatan yaitu Mewujudkan Kecamatan yang Moderen dan Prima dalam pelayanan untuk Kesejahteraan Rakyat secara gratis besar program yang akan dilaksanakan Kecamatan pada Tahun 2019 mencakup 2 (dua) program urusan Pemerintahan umum yang terdiri

atas 16 (enam belas) kegiatan dan 11 (sebelas) program urusan wajib / prioritas yang terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan, yang terangkum dalam 7 (tujuh) urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintah Umum

Nama Program	Nama Kegiatan
<p>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional d. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan-Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan i. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan k. Penyediaan Makanan dan Minumann l. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah m. Rapat-Rapat Koordinasi Konultasi Luar Daerah
<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan peralatan gedung kantor; b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor; c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Nama Program	Nama Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Penyelenggaraan userenbangram
Program Pengembangan Data/Informasi	b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Program	Nama Kegiatan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	a. Pembinaan Organisasi b. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Nama Program	Nama Kegiatan
Program pengembangan wawasan kebangsaan	a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Program	Nama Kegiatan
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	a. Fasilitas APBDes; b. Fasilitas program pembangunan pedesaan. c. Fasilitas program pembangunan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	a. Pembinaan PKK

6. Urusan Statistik

Program	Kegiatan Indikatif
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	a. Penyusunan data base dan profil desa dan Kecamatan

7. Urusan Sosial

Program	Kegiatan Indikatif
Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	a. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronalisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

8. Urusan fungsi lainnya

Program	Kegiatan Indikatif
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	s. Fasilitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sesuai kewenangan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Kecamatan merencanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021 terdiri dari 2 urusan, 4 program dan 41 kegiatan dengan program kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 4.1 RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

NO REKENING	URUSAN/ BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN	TOLAK UKUR	TOLAK UKUR	TOLAK UKUR	TARGET	PENDANAAN
1.20.18	KECAMATAN SRUWENG					2.121.758.000
7.1.20.18	UNSUR KEWILAYAHAN					266.000.000
7.01.1.20.18	KECAMATAN					266.000.000
7.01.1.20.18.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan				75.000.000
7.01.1.20.18.02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase Pengajuan KTP dan Perijinan yang ditangani			75.000.000
7.01.1.20.18.02 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan			Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	1 Jenis	5.000.000
7.01.1.20.18.02 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan			Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	6 Jenis	70.000.000
7.01.1.20.18.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasi nya kegiatan HUT RI				25.000.000
7.01.1.20.18.05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terselenggara nya urusan Pemerintaha n umum sesuai penugasan Kepala Daerah			25.000.000

7.01.1.20.18.05	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Ke			Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI Pasokiraka, Carnaval, (rasyo HUR RI dan Hari Jaki)	1 Kegiatan	28.000.000
7.01.1.20.18.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa				166.000.000
		Tersedianya dokumen operasional kebijakan pembangunan Daerah				
		Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa				
		Terfasilitasi kegiatan TKP2Kdesa				
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi			166.000.000
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 Desa	33.000.000
7.01.1.20.18.06				Jumlah dokumen profil data base yang disusun	1 Dokumen	
				Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan	21 Desa	

7.01.1.20.18.06	Melembudakan Pengangkutan dan Pemberhentian Pengangkut Desa			APRDesa	Jumlah desa yang Melembudakan pengangkutan dan pemberhentian pengangkut desa yang diukur	5 Desa	10.000.000
2.01.08							
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa			Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen		10.000.000
2.01.09							
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan muarembangdes	21 Desa		35.000.000
2.01.11							
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan muarembangdes	3 Kegiatan		23.000.000
2.01.13							
7.01.1.20.18.06	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	6 Kegiatan		45.000.000
2.01.15							
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan		
				Jumlah Kegiatan Pembinaan sosial masyarakat	4 Kegiatan		
				Jumlah kegiatan Pembinaan UKS	1 Kegiatan		
7.01.1.20.18.06	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes/Ke	1 Kegiatan		10.000.000
2.01.17				Jumlah	1 Kegiatan		

X.1.20.18				Anggaran program pembekalan		
X.XX.1.20.18						1.855.758.000
X.XX.1.20.18.0	PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan Administrasi perkantoran				1.855.758.000
		Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai				1.855.758.000
		Tersedianya dokumen database perangkat Daerah				
X.XX.1.20.18.0	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			17.000.000
X.XX.1.20.18.0	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen	12.000.000
X.XX.1.20.18.0	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	5.000.000
X.XX.1.20.18.0	Administrasi Keuangan		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			1.573.881.000
X.XX.1.20.18.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15 Orang	1.555.881.000
				Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	15 Orang	
X.XX.1.20.18.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dalam Daerah	15 Orang	18.000.000
X.XX.1.20.18.0	Administrasi Umum		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum			264.877.000
X.XX.1.20.18.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah paket penyediaan jasa surat	12 Paket	2.500.000

X.XX.1.20.18.0 1 2.03.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Paket	30.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	27.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	77 Orang	18.265.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah petugas kebersihan Kantor	2 Orang	30.000.000
				Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Paket	
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah paket Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Paket	7.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	7.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	7.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	4.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Jenis	3.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Paket	16.050.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	48 Orang/Kali	7.000.000
X.XX.1.20.18.0 1 2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah unit pengadaan kendaraan	2 Unit	40.000.000


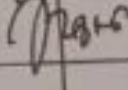
				dinas operasional		
XXX.1.20.18.0 1 2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	31.000.000
XXX.1.20.18.0 1 2.03.25	Pengadaan Mebeleur			Jumlah unit Pengadaan Mebeleur	10 Unit	7.000.000
XXX.1.20.18.0 1 2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkal a Rumah Jabatan	1 Unit	5.000.000
XXX.1.20.18.0 1 2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkal a Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	22.942.000
			Sarana dan Aparatur	Prasarana		1. Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor
						5. Pembanguann Gedung Kantor
			Nilai / Predikat AKIP	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1. Penyusunan Dokumen AKIP

BAB V
PENUTUP

Demikian rencana kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2021, yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menerjemahkan visi dan misi yang diemban. Semoga dengan tersusunya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan diprioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait, serta sebagai bahan masukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahunan 2021.

Pada akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini. Dan sebagai manusia biasa tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk ini kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Juli 2020
KECAMATAN SRUWENG
SURYONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19641024 198607 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAP3DA	
NAMA	TANDA TANGAN
AMILAH THAMRIN, S.STP	
HANTARIMAHA DEWI, SP	

LAMPIRAN


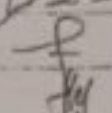
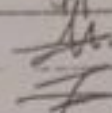
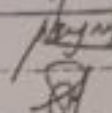
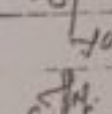
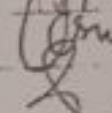
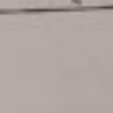
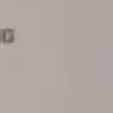
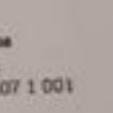
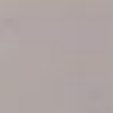
- o Daftar hadir musrenbang 2019.
- o Berita acara Musrenbangcam 2019.
- o Notulen.
- o Print out simper 2021.
- o Print RAB 2021

NAMA	JENIS KELAMIN		DESA	NO TELP/HP	TANDATANGAN
	L	P			
Purjadi	L				
So Sumbel		P	Menganti		
Supriyadi	L				
Muhammad	L			08172156642	
Supardi	L				
Lanang		P			
Kherudin	L				
Kurniawan		P	Trikarno		
Tety Endang-S		P			
Samsi	L				
Dan Elyx		P			
Suman		P			
S Supriyadi	L				
Samat Santoso	L		Sidoarjo		
Asri	L				
Sri Wahyuni		P			
Umi Sartika		P			
Imam Budi W	L				
NURBANDONO	L		Giwangretno		
AGUS SUGENO	L				
Amir Budhan		P			
Imam n	L				
Eka Andriyani		P			
Sotihudin	L				
WAGIMU	L		Jabres		
Ati		P			
Iri Nuryamsi		P			

NAMA	JENIS KELAMIN		DESA	NO TELP/HP	TANDA TANGAN
	L	P			
Purwadi	L				
Do Yandek		P	Menganti		
SAMIR TRIKUN	L				
MULIMIN	L			08172156693	
SUPARDI	L				
Lirawan		P			
Kheradin	L				
Karimah		P	Trikoran		
Tuty Endang-S		P			
Syami	L				
Dan Ely		P			
Suman		P			
S Supriadi	L				
James Santoso	L		Sidabaja		
Azzafi	L				
Sri Wahyuni		P			
Umi Sartika		P			
Imam Andri W	L				
NURAMOND	L		Cinangretno		
AGUS WIGENO	L				
Amih Bandari		P			
Imam r	L				
Eka Andriyani		P			
Solihudin	L				
WAGIMIN	L		Jabres		
Ari		P			
Iri Nuryama		P			

NAMA	JENIS KELAMIN		DESA	NO TELP/HP	TAMBATAN
	L	P			
Muhammad Nur	L		Jabres	087715000232	
Muhammad	L			081327549919	
Muhammad	L				
Muhammad	L		Drumbak	087804082115	
Muhammad	L				
Muhammad	L			08156875171	
Muhammad		✓		081128031127	
Muhammad		✓		08212508377	
Muhammad		✓			
Muhammad			Karanggedang		
Muhammad		✓			
Muhammad		P			
Muhammad	L				
Muhammad	L				
Muhammad	L				
Muhammad	L		Purwodadi	081928507966	
Muhammad					
Muhammad		P			
Muhammad	L				
Muhammad	L			087786152111	
Muhammad					
Muhammad			Kepusanggan		
Muhammad	L				
Muhammad	L				
Muhammad		✓			
Muhammad	L				
Muhammad		L			
Muhammad	✓		Tanggapan	081327459112	
Muhammad		✓			
Muhammad	L			081563426288	
Muhammad					

NAMA	JENIS KELAMIN		DESA	NO TELP/HP	TANDATANGAN
	L	P			
Sajidun Madiyana Hamfal	L		Kerawang	08191804532	
Tri Subetti Pusparini		P	Karangambu	085974741212	
Sulis Riyanto Rina Pujiaji	L			081348390615	
Leni N. A		P		082138111961	
Sofyan Epardi H A'Zal	L	P			
A. Komarudin	L		Sidoagung		
Makaminia Waji Laskari	L	P		0819 1511 4747	
Roni Budiyanti Wahiduri		P			
Mugiana		P			
KUSWARANI			Penumpang		
SUTARNO	L			085 44 57145	
Mafec Qodri	L			081 392 036166	
MUSLIKHATUN		P		0822 43617142	
RUSMINI		P		0812 11586698	
Mu'ajirin	L			081357544678	
SURYAN	L		Dusunari		
Mujiyanto	L			0821 3374 1485	
Kartono	L			0821340 5598	
Dinda Nuritika		P			
Tovik Aelhan	L				
Dem'		P			

NAMA	JENIS KELAMIN		DESA	NO TELP/HP	TANDATANGAN
	L	P			
CUBONO	L		Pandanewi	08230047366	
Ranito	L				
Qamir		P			
Eka W		P			
WASITE	L				
Su gya fuh		P			
Kangmab		P	Candragempur		
Fahri Clewul	L				
Rus/anti		P			
Daryat		P			
GU Suardi	L				
TALISA					

Sruweng, 2 Nopember 2019

CAMAT SRUWENG



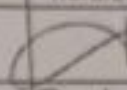
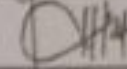
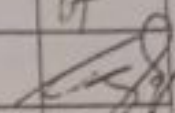
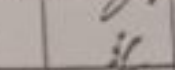
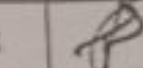
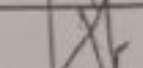

EUYTINO, S.Sos
Pembina Tk 1

NIP. : 19641024 198607 1 001

DAFTAR HADIR KARASUMBER SUBRENDANG BKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN TAIHUN 2019

KECAMATAN
TANGGAL
TEMPAT

1. Sraweng
2. 26 Mar 2019
3. Pendopo Kecamatan Sraweng

NO.	NAMA	Jenis		LEMBAGA / INSTANSI	ALAMAT DAN TELP/HP	NO	TANDA TANGAN
		L	P				
1	Ken Simanah	✓		Koperasi Buluh	C. T. H. S. S. S.		
2	Ismiah		✓	BKAD	Sraweng		
3	Lutfi Raf		✓	Pertanian	Sraweng		A
4	NAWANGSURYANA	L		Mp300	KOMON		
5	ROHMATIN		P	B.P. KA	SRAWENG		
6	M. Lu. & Yin	L		Ko. Pura	SRAWENG		
7	TH SUPRIYANTO	L		PAJER	PAJER		
8	W. S. S. S. S.	L		Volax	Sraweng		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG
KECAMATAN SRUWENG TAHUN 2019

Pada hari ini Selas tanggal Dua Puluh Enam bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan belas bertempat di Pendopo Kecamatan Sruweng telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan pada acara Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan Sruweng oleh :
 - a. Sambutan yang disampaikan oleh Suyitno, S.Sos Camat Sruweng menyampaikan maksud tujuan Musrenbang serta menyampaikan pemaparan tentang Potensi dan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sruweng serta membuka Acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Sruweng
 - b. Sambutan DPRD Kabupaten Kebumen Dapil III mengenai :
 1. 6 usulan desa sesuai program kerja SKPD akan terus dikawal di Kabupaten
 2. Terus menjaga kekompakan seperti yang selama ini telah dibangun.
 - c. Sambutan Tim Pendamping Musrenbang RKPD dari Kabupaten yang di wakli Oleh Bappeda ,mengenai :
 1. Untuk kegiatan kuota kecamatan harus sudah dengan proposal dan calon pemanfaat sudah ada
 2. Untuk program pokok pikiran oleh anggota dewan seyogianya dilaksanakan melalui mekanisme yang ada.
 - d. Pemaparan materi yang dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yaitu :
 - a. Drs. Suyitno, S.Sos (Camat Sruweng) mengenai Potensi dan kegiatan Pembangunan yang dibutuhkan diwilayah Kecamatan Sruweng khususnya yang mendukung Prioritas Bupati terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan..

- b. Dwi Retno Mustikaningsih, S.Sos, M.Si (PM / Tim penyelenggara)
Pemaparan Bahan Musrenbang yaitu
- 1) Tabel 1. Daftar Prioritas Usulan Desa Tahun 2021 sebagai usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2021 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah;
 - 2) Tabel 2. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2021 sebagai Usulan Kegiatan Kuota Kecamatan Tahun 2021
- c. Penyepakatan hasil perankingan usulan 1 usulan desa menjadi usulan kuota Kecamatan Tahun 2021 dan sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2021 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah;
- d. Penyepakatan Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2021 sebagai Usulan Kegiatan Kuota Kecamatan Tahun 2021 (Tabel 3) berdasarkan penyepakatan hasil perankingan;
- e. Penyepakatan usulan kegiatan-kegiatan yang tersisa sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2021 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah (Tabel 4) berdasarkan penyepakatan hasil perankingan;
- f. Tanggapan dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang termasuk narasumber Kabupaten;
- g. Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi kecamatan (maksimal 6 orang) untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 Nopember 2019
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Sruweng

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Sruweng :

MENYEPAKATI

1. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2021 sebagai Usulan Kegiatan Kuota Kecamatan Tahun 2021 (Tabel 3)
2. Daftar Rekapitulasi Prioritas Usulan Desa Tahun 2021 Untuk Diusulkan ke Perangkat Daerah (Tabel 4)
3. Daftar Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2021 (Tabel 6).
4. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Tahun 2021 (Lampiran 1)
5. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2021 yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan sesuai pagu indikatif Kecamatan (Format Renja).
6. Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sruweng, 26 Nopember 2019

Pimpinan Sidang



Suyitno, S.Sos

























Pembina Tk 1

NIP.: 19641024 198607 1 001

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Sruweng Tahun 2019

Daftar peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
2	3	4	5
Arif, MT, MM	BAP3DA	Kebumen	
Fitria Hardini, SH	Kecamatan	Sruweng	
Ismiati	Anggota Dewan	Kebumen	
Tambah	Lembaga BKAD	Sruweng	
Purwadi	Danramil	Sruweng	
KHERO DIN	Desa Menganti	Menganti	
Sani Supriyadi	Desa Trikarso	Trikarso	
N M P. ulfana	Desa Sidoharjo	Sidoharjo	
GIAS MIN	Desa Giwangretno	Giwangretno	
Murwahyudi	Desa Jabres	Jabres	
H. Supara	Desa Sruweng	Sruweng	
RIYANTO	Desa Karanggedang	Karanggedang	
Handoko	Desa Purwodeso	Purwodeso	
Dagat. 701	Desa Klepusanggar	Klepusanggar	
Purnawanto	Desa Tanggeran	Tanggeran	
Agis Firdi	Desa Karang Sari	Karang Sari	
Awaledi	Desa Karangpule	Karangpule	
ALFAN Fadoli	Desa Pakuran	Pakuran	
Basimmi	Desa Pengempon	Pengempon	
Tri Subesti Purpani	Desa Kejawang	Kejawang	
Rani Budiyanto	Desa Karangjambu	Karangjambu	
Kuswanto	Desa Sidoagung	Sidoagung	
Muji anto	Desa Penusupan	Penusupan	
SURONO	Desa Donosari	Donosari	
Nanginab	Desa Pandansari	Pandansari	
	Desa Condongcampur	Condongcampur	

DAFTAR NAMA DELEGASI KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI FORUM OPD
DAN MUSRENBANG RKPd KABUPATEN TAHUN 2020

KECAMATAN : SRUWENG

NAMA	Jenis Kelamin		UNSUR / JABATAN / ALAMAT	KEL. BIDANG
	L	P		
SUYITNO, S.Sos.	L		CAMAT	Bidang PTW
RIYONO, S.Sos.	L		SEKRETARIS CAMAT	Bidang Pemsosbud
RETNO M, S.Sos.M.Si.		P	KASI PMD	Bidang Ekonomi
ANGINAH		P	DELEGASI DESA CONDONGCAMPUR	Bidang PTW
DOKO	L		DELEGASI DESA KLEPUSANGGAR	Bidang Pemsosbud
ERODIN	L		DELEGASI DESA TRIKARSO	Bidang Ekonomi

CAMAT SRUWENG



SUYITNO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19641024 198607 1 001

NOTULEN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN SRUWENG TAHUN 2019

Hari / Tanggal : Selasa, 26 November 2019
Waktu : Jam 09.00 WIB - selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Sruweng
Acara : Musrenbangcam tahun 2019 Kecamatan Sruweng

Uraian Rapat :

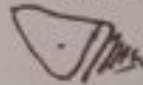
- Rapat Musrenbangcam dihadiri oleh 150 orang dari unsur Delegasi Desa, DPRD Dapil III, BKAD, Tim Kabupaten, Tim Kecamatan dan Muspika Kecamatan Sruweng.
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Laporan Ketua tim Penyelenggara oleh Moh Afandi,SH
- Pembukaan dari Camat Sruweng sekaligus paparan mengenai masalah utama Kecamatan serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Sambutan dari Tim monitoring Kabupaten oleh Bapak Arifin, MT.MM
- Sambutan dari DPRD Dapil III oleh B Fitria Handini,SH
- Paparan Hasil Pra Musrenbangcam tentang Kuota Kecamatan sekaligus penetapan hasil Prioritas Kegiatan Kuota dan ke OPD tahun 2021 disampaikan oleh Kasi PM Hj Dwi Retno Mustikaningsih,S.Sos,MM
 1. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan tahun 2021 sebagai Usulan Kegiatan Kuota Kecamatan tahun 2021 (tabel 3)
 2. Daftar Rekapitulasi Prioritas Usulan Desa tahun 2021 untuk diusulkan ke Perangkat Daerah (Tabel 4)
 3. Daftar Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten tahun 2021 (Tabel 6)
 4. Daftar Hadir Peserta Musrenbangcam tahun 2021 (Lampiran 1)
 5. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2021 yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan sesuai pagu indikatif Kecamatan (format renja)
 6. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2021.
 - a. Penyepakatan Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan tahun 2021 sebagai usulan Kegiatan Kuota Kecamatan tahun 2021 berdasarkan penyepakatan hasil perengkingan
 - b. Penyepakatan usulan kegiatan - kegiatan yang tersisa sebagai usulan kegiatan pembangunan Kecamatan tahun 2021 yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah berdasarkan hasil perengkingan

Memilih dan menetapkan daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

1. Suyitno, S.Sos
2. Suparyo, S.Sos
3. Dwi Retno M, S.Sos. M.Si
4. Handoko
5. Wanginah
6. Kherodin

4. Penanda tangan BA Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Sruweng tahun 2021

NOTULIS



TRI LASMINI YULIANTI

Nama	Urutan Bilangan/ Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Page Institutional Ppt	Alokasi Dana Ppt (M)	Alokasi Dana (M)	Pagu	
						Tidak Ular	Tarjet	Tidak Ular	Tarjet	Tidak Ular	Tarjet					
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
(1)	22	(2)	(4)	(5)	(6)	Terdapatnya dokumen operasional kegiatan pembangunan daerah	100 %									
						Jumlah organisasi perpusat yang berperan dalam pembangunan desa	100 %									
						Fasilitas yang terdapat di TP-200000	100 %									
2017.20.10.00.201	Pembinaan, Nuklenerisasi dan Rehabilitasi Prasarana dan Peningkatan Prestasi Pelayanan Desa	3	1	3	KECAMATAN BUKITMENDI,			Pelayanan desa yang berkualitas mendapat umpan balik dan	100%							
2017.20.10.00.201.00	Fasilitas Pengiriman Kumpulan Desa dan pembangunan Alat Desa	3	1	3	KECAMATAN BUKITMENDI,			Pelayanan desa yang berkualitas mendapat umpan balik dan	100%							
2017.20.10.00.201.00	Rehabilitasi Pengiriman dan Peningkatan Prestasi Pelayanan Desa	3	1	3	KECAMATAN BUKITMENDI,			Pelayanan desa yang berkualitas mendapat umpan balik dan	100%							
2017.20.10.00.201.00	Fasilitas Substansi Pengiriman dan Peningkatan Prestasi Pelayanan Desa	3	1	3	KECAMATAN BUKITMENDI,			Pelayanan desa yang berkualitas mendapat umpan balik dan	100%							

Printed by SMP/SD at 10:00:00 on 10/27/2018

Halaman 2 dari 8

REKAMAH PROSES DAN REKAMAH PROSES (R&R) BUKITMENDI

Nama	Uraian/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Page	Kendaraan	Berkas	Problema	
						Tidak Ular	Tarjet	Tidak Ular	Tarjet	Tidak Ular	Tarjet					
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
7.01.1.20.18.06 2.01.11	(2) Fasilitas Penyempurnaan Kantoran dan Koneksi Listrik	5	1	5	KECAMATAN SIRUWINDO,							11.000.000	100	11.000.000	100	100
7.01.1.20.18.06 2.01.13	Fasilitas Penyempurnaan Peningkatan Perikanan	5	1	5	KECAMATAN SIRUWINDO,							11.000.000	100	11.000.000	100	100
7.01.1.20.18.06 2.01.15	Fasilitas Penyempurnaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	1	5	KECAMATAN SIRUWINDO,							11.000.000	100	11.000.000	100	100
7.01.1.20.18.06 2.01.17	Koordinasi Peningkatan Desa di Wilayahnya	5	1	5	KECAMATAN SIRUWINDO,							11.000.000	100	11.000.000	100	100
8.03.01.18 3.00.1.20.18	PROGRAM PENGANGKUTAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH						10%					1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		

Revisi 10 Januari 2018

Halaman 3 dari 8

REKAMDA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DAERAH

No	Nama	Maksud/Motif/Program (Ringkasan Sub Kegiatan)	Prioritas Kategori	Prioritas Program	Indikator Kuantitatif	Lokasi	Program		Sub Kegiatan		Page Indikator Fisik	Indikator Monev
							Tipe	Target	Tipe	Target		
							Indikator Fisik	Target (%)	Indikator Fisik	Target (%)		
1			(P)	(A)	(P)							
	1.001.1.20.10.01 3.101	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengabdian Masyarakat										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01	Penyusunan Rencana dan Kerja Pengabdian Masyarakat										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pengabdian Masyarakat										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01.01	Administrasi Kegiatan										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01.01	Penyusunan Laporan Kegiatan dan Tinjauan Kembali										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm										
	1.001.1.20.10.01 3.101	Administrasi Umum										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01	Penyusunan dan Kerja Lapangan										
	1.001.1.20.10.01 3.101.01.01	Penyusunan dan Administrasi Kegiatan dan Administrasi										

Indikator Monev

Indikator Fisik

Indikator Monev

Nomor	Uraian Bireng Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Program		Sub Kegiatan		Fisik (Rp)	Fisik (Rp)	Fisik (Rp)	Fisik (Rp)		
						Tolak Ujar	Target	Tolak Ujar	Target					Tolak Ujar	Target
						(11)	(12)	(13)	(14)						
X001.2018.01.2.03.08	(2) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perumahan dan Desa/Operasional	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000		
X001.2018.01.2.03.07	Penyelenggaraan Administrasi	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
X001.2018.01.2.03.08	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000		
X001.2018.01.2.03.09	Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan Warga	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000		
X001.2018.01.2.03.10	Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Desa	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
X001.2018.01.2.03.11	Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000		
X001.2018.01.2.03.12	Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
X001.2018.01.2.03.13	Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000		
X001.2018.01.2.03.14	Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan	3	1	3	REGABANTAN SRUMENDH.					7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000		

